

## Implementasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Bitung Dalam Meningkatkan Potensi Investasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara

*Adhitia Christin Ponto*<sup>1</sup>

*Ventje Tamowangkay*<sup>2</sup>

*Trilke Tulung*<sup>3</sup>

*Email Korespondensi: tyapontoh5@gmail.com*

### Abstrak

Adapun Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung dalam meningkatkan Potensi Investasi Di Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Beberapa tahun belakangan ini, pemerintah membuat kebijakan untuk meningkatkan investasi, mempercepat pembangunan, terutama di luar Pulau Jawa dan meningkatkan daya saing ekonomi melalui pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Dasar hukum pembentukan KEK adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai pada KEK. Potensi investasi KEK yang ada di Bitung cukup besar mengingat perkembangan daerah Sulawesi utara dalam perekonomian cukup baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pada perkembangannya masih mengalami beberapa masalah seperti lahan penggunaan KEK yang belum semuanya memiliki SK – HPL dan juga masih adanya masyarakat yang menyerobot membuat bangunan liar di kawasan ekonomi khusus bitung.

***Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Kawasan Ekonomi Khusus, Investasi***

<sup>1</sup> *Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

<sup>2</sup> *Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

<sup>3</sup> *Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

*Sekretariat:*

*Gedung H6.2.2. Fispol Unsrat*

*Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

## Pendahuluan

Tahun 2014, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung yang menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung yang berlokasi di Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara dengan luas 534 hektar. Dengan lokasi yang sangat strategis dan merupakan pintu gerbang ekonomi ke negara-negara Asia pasifik, diharapkan KEK Bitung sebagai hub perdagangan bagi Kawasan Timur Indonesia. Berdasarkan potensi wilayah dan keunggulan geostrategis, KEK Bitung diharapkan mendorong hilirisasi dan mendongkrak daya saing sektor perikanan, agro, farmasi dan menarik investasi senilai Rp 32 triliun hingga tahun 2025.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi sebuah daerah untuk mengelola kawasan ekonomi khusus yakni harus dibentuk badan usaha pembangunan dan pengelola, oleh sebab itu pada tahun 2016 pemerintah daerah mengeluarkan surat keputusan gubernur provinsi Sulawesi Utara nomor 6 tahun 2016 tentang pendirian PT. Membangun Sulut Hebat perseroan daerah yang kemudian ditunjuk sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang mengelola Kawasan Ekonomi Khusus Bitung. Selanjutnya hingga tahun 2019, PT Membangun Sulut Hebat selaku pengelola KEK Bitung baru menguasai 92 hektar lahan (masih dalam penguasaan Pemerintah Provinsi Sulut) dari 441 hektar yang masuk dalam KEK Bitung (Sudarwan, 2019).

Data Dewan Nasional KEK, sampai dengan Agustus 2019, total komitmen investasi ke KEK Bitung adalah sebesar Rp1,79 triliun. Komitmen investasi tersebut berasal dari empat perusahaan, yaitu: PT Futai Sulawesi Utara, PT Indojoya Fortuna, PT Mapalus Makawanua, dan PT Puri Bitung Gemilang. 2 perusahaan yang telah merealisasikan investasinya yaitu PT Indojoya Fortuna sebesar Rp350 miliar untuk membangun fasilitas pendingin (cold storage) dan PT Futai Sulawesi Utara senilai Rp1,4 triliun untuk membangun industri kertas daur ulang. (CNN Indonesia, 2019, [senilai-rp18-triliun-serbu-kek-bitung\).](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190904123917-92-427419/investasi-</a></p></div><div data-bbox=)

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pihaknya siap untuk memfasilitasi dan mempermudah kepada investor untuk mendorong perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, Sulawesi Utara. Saat kunjungannya ke KEK Bitung, Basuki menilai perkembangan kawasan tersebut masih belum optimal. Menurutnya, KEK Bitung masih memerlukan sejumlah dukungan agar dilirik oleh para investor. pada saat dukungan tersebut diberikan, minat investor secara drastis langsung meningkat untuk mengisi lahan di KEK Bitung. Untuk itu, dia mendorong kepada pemerintah daerah agar segera mencari investor untuk KEK Bitung. (ekonomi.bisnis.com).

Dengan adanya pandemi covid-19 diawal tahun 2020, semakin memperlambat alur investasi oleh pihak swasta terutama investor dari luar negeri untuk menanamkan modalnya di Sulawesi utara khususnya di kawasan ekonomi khusus bitung.

Berdasarkan uraian di atas, kalau dilihat dari penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung di tahun 2014 sampai dengan 2021, progres dari Kawasan Ekonomi Khusus Bitung terhitung cukup lambat..

## Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengambil lokasi di Lokasi penelitian ini dilakukan di Administrator KEK Bitung dan perusahaan yang telah beroperasi di KEK Bitung.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Charles O. Jones mengemukakan teori implementasi kebijakan yang terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik, yaitu: organisasi, interpretasi dan aplikasi.

Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Administrator KEK Bitung
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Utara

### 3. Investor KEK

Teknik pengumpulan data adalah langkah terpenting dalam penelitian ini karena bertujuan mendapatkan data agar dapat di analisis. Menyangkut teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data adalah proses menemukan dan menyusun data yang terkumpul, sehingga data tersebut dapat disimpulkan dan digunakan sebagai bahan informasi yang dapat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Penarikan kesimpulan

### Pembahasan

#### 1. Organisasi

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan kawasan ekonomi khusus bitung melalui aspek organisasi, pengelolaan keuangan dalam bentuk anggaran untuk operasional kegiatan kantor dan lainnya merupakan hal yang turut berperan dalam suksesnya pelaksanaan kegiatan. Kondisi anggaran keuangan yang ada di pengelola KEK yakni PT. MSH menunjukkan anggaran dana yang sudah baik pengelolaannya, sehingga keuangan PT. MSH sudah terlihat tertib. Hal tersebut sesuai dengan penuturan informan J.L serta penelusuran data sekunder. Sumber pendanaan awal berasal dari pemerintah daerah melalui Rapat umum pemegang saham tahun 2018 dana awal operasional yang dikucurkan sebesar Rp. 5 Miliar dari pemerintah provinsi dan Rp. 1 Miliar dari pemerintah Kota Bitung, dari modal awal tersebut sebagai Badan Usaha Milik Daerah PT.MSH tidak boleh sepenuhnya bergantung dana dari pemerintah namun harus menyumbang PAD.

Dari data dan fakta tersebut terlihat dukungan yang kuat dari segi organisasi yakni sumberdaya keuangan serta sarana dan prasana, berkaitan dengan pengelolaan KEK Bitung. Pada sekarang ini masih dalam tahap

pencarian investor serta pembangunan beberapa sarana dan prasarana penunjang lainnya. Dengan kelembagaan yang kuat, maka pengelolaan kawasan ekonomi khusus sangat diharapkan untuk mampu menopang perekonomian sulawesi utara. Namun sejauh ini terlihat operasional Kek Bitung memang belum berdampak signifikan terhadap hal ini dikarenakan belum lamanya resminya kek dijalankan.

Berdasarkan hasil penelitian yakni wawancara dengan para informan serta penelusuran data penunjang peneliti menganalisis bahwa aspek organisasi pada implementasi kebijakan kawasan ekonomi khusus bitung sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan dan kemajuan kawasan ekonomi khusus bitung, hal ini disebabkan bahwa pengelolaan KEK Bitung sepenuhnya merupakan insiatif pemerintah pusat dan di tunjang oleh keseriusan pemerintahan dalam menjalankan kebijakan KEK tersebut. Peneliti juga menganalisis bahwa aspek organisasi belum sepenuhnya optimal hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kebijakan KEK merupakan kebijakan nasional yang petunjuknya mengikuti arahan pusat dan juga pelaksanaan KEK bukan dibawah langsung oleh pemerintah daerah melainkan dilakukan melalui badan usaha milik daerah provinsi Sulawesi Utara dan PT. MSH selaku penanggungjawab kegiatan merupakan perusahaan yang baru terbentuk sehingga masih minim pengalaman dalam mengembangkan proyek yang dengan anggaran yang sangat besar.

#### 2. Interpretasi

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada par informan menunjukkan bahwa aspek interpretasi pada implementasi kebijakan kawasan ekonomi khusus yang dilaksanakan oleh PT. Membangun Sulut Hebat telah dimengerti dan dipahami oleh para pegawai dan pemegang arah kebijakan. Hal tersebut didasari oleh tingkat pemahaman implementor akan tujuan serta tugas dan pokok mereka masing-masing yakni terlihat paa informan J.L. dan informan LL. Kedua informan tersebut sangat memahami

mengenai pengelolaan kawasan ekonomi khusus bitung yang dikelola one PT. MSH.

Dalam penelitian ini interpretasi atau pemahaman yang baik implementor terhadap kebijakan kawasan ekonomi khusus bukan hanya PT. Membangun Sulut Hebat namun juga elemen pemerintah daerah sulawesi utara lainnya akan sangat menentukan keberhasilan implementasi kawasan ekonomi khusus bitung kedepannya. Keberhasilan organisasi publik sangat ditentukan sumber daya manusia yang memiliki nilai-nilai tersebut, dan mendukung keberhasilan organisasi publik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta menentukan juga pemanfaatan sumber-sumber lainnya yang dapat dikelola secara efektif. Betapa pentingnya kontribusi terhadap peningkatan/pengembangan profesionalitas sumber daya manusia aparatur serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan yang diberikan mereka.

Agar implementasi kebijakan pengelolaan kawasan ekonomi khusus bitung itu berhasil perlu dipahami dimensi interpretasi itu dengan baik, sebab interpretasi akan dapat memperjelas pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Artinya semakin baik interpretasi aparatur/ pengelola terhadap isi kebijakan itu maka akan semakin efektif pula penyelenggaraan kebijakan kawasan ekonomi khusus bitung tersebut. Kebutuhan utama bagi pelaksanaan kebijakan adalah bahwa implementor harus mengetahui secara jelas apa yang seharusnya dilakukan, mereka harus memiliki cara pandang yang sama terhadap isi kebijakan. Jika kebijakan ingin dilaksanakan dengan tepat, arahan, dan petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas. Jika masih terjadi ketidakjelasan mengenai apa yang seharusnya dilakukan implementor akan membuat mereka kebingungan, sehingga pada akhirnya mereka bertindak berbeda dengan pandangan dari atasan mereka, atau bahkan membuat kebijakan sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menganalisis bahwa tingkat pemahaman implementor terhadap isi

kebijakan telah dipahami masing-masing, baik dalam tubuh organisasi PT. MSH maupun pemerintah daerah yang didalamnya terdapat berbagai elemen seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Utara, Dinas perindustrian, badan pertanahan serta pimpinan provinsi. Dari hasil analisa peneliti, mengenai aspek interpretasi dimana hubungan komunikasi masih menjadi permasalahan antara investor, pemerintah dan pengelola.

### 3. Aplikasi

Dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan Kebijakan kawasan ekonomi khusus Bitung, peneliti melihat bahwa masih ada kendala yang cukup mengganggu kemajuan kota bitung dan bahkan KEK itu sendiri yakni dimana pada tahun 2018 pelabuhan bitung mengalami penurunan kelas, dimana sebelumnya adalah kelas I ke kelas II (eselon IIIa) oleh kementetian perhubungan melalui permenhub no. 76 tahun 2018. Dari hasil penelusuran data melalui berita online oleh peneliti mengenai penurunan kelas tersebut diakibatkan karena tidak adanya peningkatan kondisi obyektif pelabuhan tersebut, tidak adanya peningkatan cargo yang signifikan dan berpengaruh kepada kapal yang datang dan pergi. Hal ini dikatakan oleh Walikota Bitung melalui media online. (<https://beritamanado.com/ini-pendapat-max-wilar-soal-ksop-bitung-turun-kelas/>).

Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menganalisis bahwa aplikasi dari kebijakan kawasan ekonomi khusus bitung belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dikarekan permasalahan internal seperti lahan, investor dan masalah eksternal seperti pandemi covid 19 yang banyak memukul pelaku usaha dalam maupun luar negeri. Selain itu elemen penunjang seperti pelabuhan yang turun kelas sejak tahun 2018 menjadi sebuah halangan bagi calon investor karena apabila untuk mengirim (ekspor) dan menerima (import) harus terlebih dahulu melalui pelabuhan kelas I terlebih dahulu dan akibatnya memperpanjang birokrasi distribusi barang otomatis menambah biaya transportasi.

# EKSEKUTIF

Volume 3 No. 2 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

## Penutup

### Kesimpulan

1. Aspek organisasi dalam implementasi kebijakan kawasan ekonomi khusus bitung mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya, badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah daerah provinsi sulawesi utara dalam mengelola kawasan ekonomi khusus bitung ada PT. Membangun Sulut Hebat, dengan adanya dukungan pemerintah daerah.
2. Implementor pada kebijakan kawasan ekonomi khusus bukan hanya PT. MSH saja melainkan semua elemen pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang terkait dari hasil penelitian mengenai tingkat pemahaman implementor terhadap isi kebijakan didapati para implementor telah memahami tugas pokok masing-masing.
3. Pada perkembangannya masih mengalami beberapa masalah seperti lahan penggunaan KEK yang belum semuanya memiliki SK – HPL dan juga masih adanya masyarakat yang menyerobot membuat bangunan liar di kawasan ekonomi khusus bitung. Selain itu pandemi covid 19 juga menjadi permasalahan yang cukup memukul banyak pengusaha dan berdampak pada pengembangan KEK. Selain adanya penurunan kelas pelabuhan bitung dari kelas I menjadi kelas II.

### Saran

1. Kebijakan terkait peningkatan kawasan ekonomi khusus agar lebih baik, perlu adanya promosi besar-besaran lagi oleh pemerintah daerah untuk menarik investor ke daerah, selain itu perlu diatur juga pekerja lokal untuk bekerja di KEK, selanjutnya Perlu adanya konsistensi dan komitmen baik pemerintah pusat dan daerah terutama apabila terjadi pergantian pimpinan daerah, komitmen pemerintah daerah dan pusat merupakan kekuatan yang akan memajukan kawasan ekonomi khusus, selain itu pengawasan yang baik juga akan mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Pentingnya komunikasi yang baik dalam menjalankan tugas, selain itu pegawai PT. MSH juga perlu untuk adanya pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap investor. Dengan pemahaman pegawai dan pimpinan, maka akan mempermudah menjalankan kebijakan yang ada.
3. Disarankan pemerintah provinsi dan pemerintah kota Bitung bekerjasama dengan syahbandar dan otoritas pelabuhan bitung dan pelindo bersinergi dan menjalin kerjasama dalam peningkatan kembali ke kelas I untuk pelabuhan bitung salah satunya adalah dengan membentuk Tim Kerja Pengembangan Intrnational Hub Sea Port (IHP) Bitung.

### Daftar Pustaka

- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arsyad, Sitanala. 2010. *Konservasi Tanah dan Air*. Bandung: Penerbit IPB (IPB Press)
- Boone, Louis E dan Kurtz, David L. (2012). *Pengantar Bisnis*. Jilid ke-1. Terjemahan Anwar Fadriansyah. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Edwards III dan G. C., 1980. *Implementing Public Policy*. Washington : Congressional Quarterly Press.
- Faisal, Sanapiah. 2009, *Format-Format penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Grindel, Merille .S (ed). 1980 . *Politics and Policy Implementation and Public Policy in the trird World*. New Jersey: Princenton University Press.
- Jogiyanto, 2013. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi III, cet, I Yogyakarta, BPFE.
- Kuncoro, Mudrajat. 2010. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga : Jakarta.
- Madura, Jeff. (2010). *Pengantar Bisnis Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat
- Manoppo R, Agustinus Pati, Alfon Kimbal. 2021. *Implementasi Kebijakan Bela*



# EKSEKUTIF

Volume 3 No. 2 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

- Negara Untuk Jones, Charles O. 1994. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Mewujudkan Ketahanan Nasional Di Wilayah Komando Distrik Militer 1309 / Manado. Jurnal Agri SosioEkonomi Unsrat. Volume 17 Nomor 1 Tahun 2021
- Mustopadidjaja. AR. 2013. Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja. Cetakan Pertama. Perum Percetakan Negara RI. Jakarta. Mochtar Mas'ud dan Colin MacAndrews. 2001. Perbandingan Sistem Politik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong, Lexy J. 2010 Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Offset, Bandung.
- Nasir, Moh. 2013. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sadono S. 2009. Makro ekonomi Modern. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2004. Pengantar Teori Makroekonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salim, 2006. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara
- Salvatore D. 2015. Managerial Economic. Fifth Edition. Sinagpore. Thompson Learning
- Samuelson, Paul A dan Nordhaus, William D, 2014, Ilmi Makro Ekonomi. Jakarta PT. Media Edukasi.
- Siahaan. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Sofyan Syahnur, 2013. Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia, Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Volume 1, No. 2. Tendelilin E. 2010. Analisis Investasi dan Manajemen. Portofolio (Edisi pertama, cetakan kedua) Yogyakarta. BPFE
- Sugiyono. 2015. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Van Meter dan Horen. Van. 1975, "The policy Implementation Process: A Concetual Saefullah D. H. A. 2007. Pemikiran Kontemporer Adminsistrasi Publik, Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi. Cetakan kedua. Bandung : LP3AN FISIP UNPAD. Framework" Administration Society. Vol. 6 No. 4 February 1975.
- Wahab A. 2007. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa S. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta. PT Raja Grafindo Prasada
- Sumber Lainnya
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional  
<https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>
  - <https://katadata.co.id/infografik/2019/07/15/5-visi-jokowi-untuk-indonesia-2019-2024>
  - <https://www.cnbciindonesia.com/news/20191024225303-4-109976/ini-penyebab-peringkat-doing-business-indonesia-mentok-di-73>
  - <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190904123917-92-427419/investasi-senilai-rp18-triliun-serbu-kek-bitung>
  - [bps.go.id](https://bps.go.id).